



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.13, No.1, Juni 2016

KOMUNITAS ASEAN DAN TANTANGAN KE DEPAN

- Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pencapaian *Cybersecurity* melalui *ASEAN Regional Forum on Cybersecurity Initiatives*
- Membaca “PHK Massal”: Rantai Nilai Industri Elektronik, MEA, dan Tantangan Bagi Gerakan Buruh di Indonesia
- Transformasi Ruang dan Partisipasi *Stakeholders*: Memahami Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia dalam Proses Regionalisme ASEAN Pasca-2003
- Ketahanan Sosial Warga Perbatasan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN: Studi di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat

RESUME PENELITIAN

- Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru
- Problematika Kerja Sama Perbatasan Sepanjang Sungai Mekong antara Tiongkok dan ASEAN Bagian Utara
- Strategi Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN

REVIEW BUKU

- Neotradisionalisme dan Distopianisme: Tinjauan atas Tiga Buku Robert D. Kaplan

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 13	No. 1	Hlm. 1-143	Jakarta, Juni 2016	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	------------	-----------------------	-------------------

**Jurnal
Penelitian Politik**



Mitra Bestari

Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam, serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2P-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2P-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2P-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. Bahtiar Effendy (*Ahli Kajian Politik Islam*)
Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (*Ahli Kajian Pertahanan dan Hubungan Internasional*)
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)
Prof. Dr. Dede Mariana (*Ahli Kajian Politik Lokal dan Pemerintahan*)
Dr. C.P.F Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN, Eropa*)
Dr. Nurliah Nurdin (*Ahli Kajian Pemilu dan Pemerintahan*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Nico Harjanto, Ph.D (*Ahli Kajian Perbandingan Politik*)

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

Pemimpin Redaksi

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si

Dewan Redaksi

Adriana Elisabeth, Ph.D (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Kurniawati Hastuti Dewi, Ph.D (*Ahli Kajian Politik Lokal, Gender dan Politik*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)

Redaksi Pelaksana

Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)
Athiqah Nur Alami, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)

Sekretaris Redaksi

Hayati Nufus, S.Hum
Esty Ekawati, S.IP., M.IP
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, E-mail: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id

ISSN

1829-8001

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii-v
Artikel	
• Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pencapaian Cybersecurity melalui ASEAN Regional Forum on Cybersecurity Initiatives <i>David Putra Setyawan dan Arwin Datumaya Wahyudi Sumari</i>	1-20
• Membaca “PHK Massal”: Rantai Nilai Industri Elektronik, MEA, dan Tantangan Bagi Gerakan Buruh di Indonesia <i>Fathimah Fildzah Izzati</i>	21-32
• Transformasi Ruang dan Partisipasi Stakeholders: Memahami Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia dalam Proses Regionalisme ASEAN Pasca-2003 <i>Ahmad Rizky Mardhatillah Umar</i>	33-52
• Ketahanan Sosial Warga Perbatasan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN: Studi di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat <i>Sandy Nur Ikfal Raharjo</i>	53-68
Resume Penelitian	
• Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru <i>Diandra Megaputri Mengko, dkk</i>	69-82
• Problematika Kerja Sama Perbatasan Sepanjang Sungai Mekong antara Tiongkok dan ASEAN Bagian Utara <i>Awani Irewati, dkk</i>	83-104
• Strategi Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN <i>Khanisa, dkk</i>	105-118
Review Buku	
• Neotradisionalisme dan Distopianisme: Tinjauan atas Tiga Buku Robert D. Kaplan <i>Nanto Sriyanto</i>	119-136
Tentang Penulis	137-138
Pedoman Penulisan	141-145

CATATAN REDAKSI

Tahun 2016 menjadi tahun yang sangat penting bagi Indonesia dan ASEAN, karenan di permulaan tahun ini Komunitas ASEAN resmi dijalankan. Pembentukan komunitas ini disepakati oleh sepuluh negara anggota ASEAN untuk mewujudkan cita-cita integrasi di antara mereka. Integrasi di kawasan ini juga diharapkan dapat membuka pintu yang lebih lebar bagi peluang kerja sama di tingkat ASEAN, sehingga dapat membawa peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di kawasan ini. Selain peningkatan kesejahteraan di kawasan, hal lain yang juga ingin dicapai oleh ASEAN adalah membangun komunitas yang menguatkan solidaritas di antara anggotanya dan lebih bersifat people-oriented. Di tengah dinamika politik dan ekonomi di tingkat internasional yang semakin kompleks, Komunitas ASEAN diharapkan mampu mendorong sepuluh anggotanya untuk meningkatkan daya saing mereka miliki, sehingga ASEAN siap menghadapi tantangan regional dan internasional yang ada. Dalam membangun komunitas yang dicita-citakan, dibentuklah tiga pilar utama, yaitu: Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN.

Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN diharapkan mampu menjaga ASEAN untuk tetap berkomitmen dalam memelihara stabilitas dan keamanan di kawasan. Hal ini diperlukan agar ASEAN dapat membangun lingkungan politik yang harmonis yang mampu menghadapi ancaman-ancaman dari luar ataupun potensi konflik di dalam tubuh ASEAN sendiri. Sementara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, ASEAN membangun Komunitas Ekonomi ASEAN dengan tujuan untuk mendorong pergerakan roda ekonomi dan perdagangan antarnegara anggota ASEAN yang mampu bersaing secara sehat. Peningkatan daya saing produk-produk dari masing-masing negara anggota ASEAN diperlukan agar ASEAN dapat mengambil peluang yang besar

dari perdagangan bebas di dunia internasional. Komunitas Ekonomi ASEAN atau yang juga dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diharapkan dapat memperkecil gap perkembangan ekonomi di antara negara anggota ASEAN dan mampu menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh anggota ASEAN. Selain peningkatan kesejahteraan ekonomi, ASEAN juga mengharapkan terbentuknya masyarakat yang memiliki solidaritas dan rasa kebersamaan yang kuat terhadap ASEAN. Untuk itulah dibentuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Kedekatan geografis diharapkan tidak hanya mampu menjalin keterhubungan secara fisik di ASEAN, namun juga mampu menjalin keterhubungan di antara masyarakat di kawasan Asia Tenggara.

Implementasi tiga pilar Komunitas ASEAN pada dasarnya akan membawa peluang yang sangat besar bagi ASEAN. Akan tetapi, pemberlakuan Komunitas ASEAN juga harus menghadapi beberapa tantangan yang muncul baik dari dalam tubuh ASEAN ataupun dari luar. Perbedaan tingkat kemajuan di antara negara anggota merupakan tantangan internal yang harus dihadapi ASEAN. Perbedaan tingkat perkembangan ekonomi negara-negara anggota ASEAN dapat menjadi ganjalan integrasi yang ingin dicapai oleh ASEAN, terutama dalam sektor ekonomi. Selain itu, perbedaan kesiapan masing-masing negara dalam menghadapi Komunitas ASEAN juga menjadi tantangan bagi ASEAN. Sementara tantangan dari luar misalnya adalah tantangan yang muncul dari konstelasi politik internasional yang masih didominasi oleh kekuatan-keuatan negara besar, seperti Amerika dan Tiongkok. Sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan empat negara anggota ASEAN (Brunei, Filipina, Malaysia, dan Vietnam) dan Tiongkok apabila tidak dapat dikelola dengan baik dapat menjadi ganjalan bagi kestabilan di kawasan ini.

Bagi Indonesia, Komunitas ASEAN juga membuka peluang yang besar, terutama dalam mendorong peningkatan daya saing yang dimiliki oleh Indonesia. Namun, dilihat dari kesiapannya, peluang yang ada tidak dapat diambil secara optimal oleh Indonesia apabila pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia masih belum memenuhi harapan. Kesiapan sumber daya manusia, tata kelola, pembangunan infrastruktur, kerangka hukum, serta kebijakan pemerintah yang mendorong partisipasi Indonesia dalam Komunitas ASEAN dirasa masih kurang. Dari segi sosial masyarakat, Indonesia masih harus menghadapi kenyataan bahwa kesadaran masyarakat akan Komunitas ASEAN masih rendah. Belum banyak masyarakat yang menyadari arti penting Komunitas ASEAN atau ASEAN sendiri bagi Indonesia. Melihat kenyataan ini, *Jurnal Penelitian Politik* kali ini mengangkat tema “Komunitas ASEAN dan Tantangan ke Depan” untuk melihat lebih lanjut sejauh mana implementasi Komunitas ASEAN akan membawa dampak bagi ASEAN ataupun Indonesia, dan tantangan apa saja yang akan dihadapi di masa mendatang. *Jurnal Penelitian Politik* edisi kali ini menyajikan lima artikel, dan tiga resume hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tim-tim penelitian yang ada di Pusat Penelitian Politik LIPI.

Artikel pertama berjudul **“Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pencapaian Cyber Security Melalui ASEAN Regional Forum on Cyber Security Initiatives”** yang ditulis oleh David Putra Setyawan dan Arwin Datumaya Wahyudi Sumari mencoba membahas tentang upaya Indonesia dalam memanfaatkan ASEAN Regional Forum (ARF) on cyber security initiatives untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam rangka mendukung keamanan nasional di bidang cyber. Kemajuan teknologi, terutama di bidang cyber telah membuat batas antarnegara menjadi semakin kabur. Hal ini memicu munculnya kejahatan dan ancaman nirmiliter di bidang teknologi bagi sebuah negara dalam bentuk ancaman cyber. Untuk menghadapi hal tersebut Indonesia memerlukan strategi untuk melindungi keamanannya. ARF menjadi salah satu forum yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengajak negara-negara ASEAN dan negara mitranya untuk bekerja sama dalam

meningkatkan pertahanan dan menjaga stabilitas di kawasan.

Sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian khusus ketika kita berbicara tentang kesiapan Indonesia dalam menghadapi Komunitas ASEAN. Artikel yang ditulis oleh Fathimah Fildzah Izzati yang berjudul **“Membaca ‘PHK Massal’: Rantai Nilai Industri Elektronik, MEA, dan Tantangan bagi Gerakan Buruh di Indonesia”** mencoba melihat dampak pemberlakuan MEA bagi buruh-buruh yang ada di Indonesia. Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menyongsong MEA sempat menimbulkan isu “PHK Massal”. Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan peran gerakan buruh dalam menghadapi MEA, terutama dalam bidang industri elektronik.

Artikel berjudul **“Transformasi Ruang dan Partisipasi Stakeholders: Memahami Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia dalam Proses Regionalisme ASEAN pasca-2003”** ditulis oleh Ahmad Rizky Mardhatillah Umar. Artikel ini menjelaskan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam dua sektor regionalisasi ASEAN, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM) dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Sejak bertransformasi menjadi bentuk ‘Masyarakat ASEAN’ pada tahun 2003, mulai muncul interaksi yang lebih kompleks antara ‘negara’ dan aktor-aktor ‘non-negara’. Artikel ini berargumen bahwa Masyarakat ASEAN telah membuka ruang yang lebih besar untuk mengakomodasi partisipasi ‘pemangku kepentingan’/stakeholders yang ada di dalamnya.

Dengan adanya integrasi di kawasan ASEAN melalui implementasi Komunitas ASEAN, masyarakat yang paling merasakan dampak langsung keterhubungan dan menipisnya batas antarnegara melalui integrasi tersebut adalah masyarakat di perbatasan. Artikel berjudul **“Ketahanan Sosial Warga Perbatasan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN: Studi di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat”** mencoba mengulas tentang sejauh mana kesiapan yang dimiliki oleh warga di wilayah perbatasan Indonesia dalam menyongsong

pemberlakuan Komunitas Ekonomi ASEAN. Artikel yang ditulis oleh Sandy Nur Ikfal Raharjo ini melihat ketahanan yang dimiliki masyarakat di Entikong melalui enam modal: modal alam, modal sosial, modal keuangan, modal politik/pemerintahan, modal fisik, dan modal manusia. Dari hasil analisis ini direkomendasikan bahwa pemerintah perlu melakukan reoptimalisasi kerja sama lintas perbatasan dengan negara lain untuk meningkatkan ketahanan masyarakat di perbatasan, dan perlu membuat aturankhusus untuk perdagangan lintas batas di dalam MEA.

Selain lima artikel di atas, *Jurnal Penelitian Politik* edisi kali ini juga menampilkan tiga resume penelitian yang telah dilakukan oleh tim-tim penelitian di Pusat Penelitian Politik. Resume penelitian pertama adalah mengenai perkembangan intelegen di Indonesia. Dalam ringkasan penelitian yang berjudul **“Intelejen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru”** yang disusun oleh Ikrar Nusa Bhakti dan Diandra Mengko Megaputri dibahas mengenai perkembangan dinamika intelegen Indonesia terutama pada masa setelah orde baru. Hasil penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang teori intelegen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia.

Tim Penelitian yang ada di Pusat Penelitian Politik LIPI pada tahun 2015 juga melakukan penelitian yang terkait dengan Komunitas ASEAN. Salah satunya adalah resume penelitian berjudul **“Problematika Kerja Sama Perbatasan Sepanjang Sungai Mekong antara Tiongkok dan ASEAN Bagian Utara”** yang disusun oleh Awani Irewati, dkk. Pada penelitian ini Tim Perbatasan Pusat Penelitian Politik LIPI melakukan penelitian tentang upaya pembangunan keterhubungan melalui kerja sama lintas perbatasan di sub-kawasan Sungai Mekong antara Tiongkok dengan lima negara ASEAN: Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Dalam kerja sama sub-kawasan ini, Tiongkok sebagai negara non-ASEAN menjadi salah satu penggerak aktif kerja sama *Greater Mekong Subregion*. Keterhubungan yang dilihat bukan hanya keterhubungan fisik saja, melainkan juga keterhubungan institusi dan keterhubungan masyarakat. Kerja sama sub-kawasan di ASEAN

sangat penting, terutama untuk mempersempit adanya gap perkembangan antara ASEAN bagian utara dengan negara anggota ASEAN yang lainnya. Dalam artikel ini juga dibahas mengenai peran kerja sama sub-kawasan di ASEAN dalam membangun keterhubungan yang akan mendorong kesuksesan implementasi Komunitas ASEAN.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal bahwa salah satu tantangan bagi Indonesia dalam melaksanakan Komunitas ASEAN adalah masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di Indonesia terhadap Komunitas ASEAN. Hal ini sesuai dengan hasil survey yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Politik pada tahun 2015. Dalam ringkasan penelitian terakhir berjudul **“Strategi Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN”** yang disusun oleh Khanisa, dkk dijelaskan bahwa kesadaran dan pemahamann publik menjadi faktor kunci yang menentukan apakah pilar-pilar yang telah disusun untuk mewujudkan Komunitas ASEAN dapat direalisasikan dengan baik. Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang ditunjukkan untuk Kementerian terkait. Strategi yang disarankan salah satunya adalah menekankan sebuah upaya berkelanjutan dan memiliki sasaran yang lebih nyata dalam melaksanakan program-program sosialisasi mengenai ASEAN dan Komunitas ASEAN kepada masyarakat.

Catatan redaksi kali ini kami tutup dengan ucapan terima kasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi sehingga *Jurnal Penelitian Politik* edisi kali ini dapat terbit. Terima kasih kami ucapkan untuk penulis, mitra bestari, serta tim pengelola jurnal. Semoga *Jurnal Penelitian Politik* ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah keilmuan dan praktis terkait dengan kajian mengenai ASEAN dan Komunitas ASEAN, serta dampaknya bagi Indonesia. Selamat membaca.

Redaksi

DDC: 324.2598

**David Putra Setyawan, Arwin Datumaya
Wahyudi Sumari**

**DIPLOMASI PERTAHANAN
INDONESIA DALAM PENCAPAIAN
CYBERSECURITY MELALUI
ASEAN REGIONAL FORUM ON
CYBERSECURITY INITIATIVES**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 1-20

Perkembangan teknologi informasi di dunia internasional berdampak pada penggunaan ruang cyber yang mencakup semua aspek kehidupan nasional. Dihadapkan pada kondisi ini, pemerintah harus memahami kondisi cybersecurity di Indonesia dan membangunnya agar mampu mengatasi berbagai ancaman yang datang melalui ruang cyber. Selain kondisi internal, ruang lingkup eksternal perlu diperhatikan mengingat ancaman cyber yang bersifat transnasional, melewati batas kedaulatan, dan telah dipandang sebagai ancaman bersama oleh negara-negara di dunia. ASEAN telah menjadi salah satu wadah bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam rangka mendukung keamanan nasional di bidang cyber. Melalui ASEAN Regional Forum (ARF) on cybersecurity initiatives, strategi diplomasi pertahanan diarahkan untuk meningkatkan rasa saling percaya (confidence building measures) antar negara dan mengurangi potensi ancaman yang dapat ditimbulkan dari lingkup eksternal. Upaya tersebut, menghasilkan kesepakatan berupa point of contacts antar negara dan persamaan pandangan untuk terus mengadakan pelatihan cybersecurity dalam bentuk seminar maupun workshop untuk membangun kapasitas sumber daya manusia. Strategi dan upaya tersebut dianalisis melalui pendekatan kualitatif dan data-data primer dikumpulkan melalui

wawancara dengan 15 informan dari berbagai instansi pemerintahan. Selain itu, literatur, jurnal, dan dokumen terkait juga digunakan sebagai data pendukung.

Kata Kunci: ARF, confidence building measures, cybersecurity, diplomasi pertahanan

DDC: 324.2598

Fathimah Fildzah Izzati

**MEMBACA “PHK MASSAL”:
RANTAI NILAI INDUSTRI
ELEKTRONIK, MEA, DAN TANTANGAN
BAGI GERAKAN BURUH DI INDONESIA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 21-32

“PHK Massal” sempat menjadi isu dalam politik perburuhan awal tahun 2016 setelah kemunculan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dalam rangka menyambut keterlibatan Indonesia dalam MEA. Adanya konstruksi kata “massal” dalam isu PHK ini tidak sejalan dengan data ketenagakerjaan, namun lebih terkait erat dengan politik produksi dalam industri elektronik. Pada sisi lain, kerentanan gerakan buruh di sektor elektronik pun kian meningkat seiring dengan meningkatnya fleksibilitas pasar tenaga kerja dalam rezim pasar bebas, termasuk dalam konteks MEA. Tulisan ini membahas hubungan antara isu PHK massal dengan rantai nilai industri elektronik di tingkat global, MEA, dan tantangan bagi gerakan buruh di Indonesia. Tujuannya untuk menunjukkan peran gerakan buruh dalam menghadapi skema ekonomi seperti MEA terutama di dalam industri elektronik melalui analisis teori rantai nilai. Dengan menggunakan metode kualitatif berupa studi literatur, tulisan ini menemukan bahwa gerakan buruh di Indonesia memiliki

peluang yang besar untuk membangun kekuatan di tingkat regional dengan memosisikan dirinya di dalam rantai nilai global dan rezim pasar tenaga kerja fleksibel.

Kata Kunci: PHK Massal, Rantai Nilai Industri Elektronik, Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja, MEA, Gerakan Buruh

DDC: 320.014

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar

TRANSFORMASI RUANG DAN PARTISIPASI *STAKEHOLDERS*: MEMAHAMI KETERLIBATAN MASYARAKAT SIPIL DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH INDONESIA DALAM PROSES REGIONALISME ASEAN PASCA-2003

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 33-52

Artikel ini mencoba untuk menjelaskan keterlibatan stakeholders tersebut dalam dua sektor regionalisasi ASEAN: Hak Asasi Manusia (HAM) dan Usaha Kecil & Menengah (UKM). Sejak bertransformasi menjadi bentuk ‘Masyarakat ASEAN’ pada tahun 2003, mulai muncul interaksi yang lebih kompleks antara ‘negara’ dan aktor-aktor ‘non-negara’. Sebelum 2003, ASEAN hanya diposisikan sebagai ‘organisasi internasional’ yang berpusat pada negara anggota sebagai satu-satunya aktor di kawasan. Menyusul diberlakukannya Masyarakat ASEAN pada tahun 2003, artikel ini berargumen bahwa Masyarakat ASEAN telah membuka ruang yang lebih besar bagi kontestasi antara negara dan ‘pemangku kepentingan’/ stakeholders yang ada di dalamnya, terutama kelompok bisnis (konglomerat dan UKM) serta organisasi masyarakat sipil. Dengan menggunakan perspektif kritis, artikel ini mencoba untuk menunjukkan bahwa sebetulnya pola interaksi yang terbangun antara aktor-aktor ‘non-negara’ dan ‘negara’ dalam spektrum Masyarakat ASEAN dimungkinkan oleh interaksi yang kian besar antara aktor-aktor yang ada di dalamnya, sehingga membuka kontestasi antar-stakeholders dalam organisasi regional yang telah bertransformasi. Hal ini kemudian memberikan pemahaman yang lebih kompleks tentang regionalisme di Asia Tenggara. Argumen tersebut akan dijelaskan melalui dua studi

kasus, yaitu aktivitas Organisasi Masyarakat Sipil HAM dan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia.

Kata Kunci: Regionalisme, Partisipasi, Pemangku Kepentingan, Masyarakat ASEAN, Asia Tenggara, Organisasi Masyarakat Sipil, Usaha Kecil & Menengah

DDC: 320.014

Sandy Nur Ikfal Raharjo

KETAHANAN SOSIAL WARGA PERBATASAN INDONESIA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: STUDI DI KECAMATAN ENTIKONG, KALIMANTAN BARAT

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 53-68

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah mulai diberlakukan pada akhir tahun 2015, dan akan ditransformasikan menjadi MEA yang inklusif pada tahun 2025. Sebagai penduduk kawasan perbatasan yang pintu gerbang lintas batas Indonesia-Malaysia, masyarakat Entikong harus memiliki ketahanan sosial yang kuat untuk menghadapi semakin bebasnya pergerakan orang dan barang di wilayah mereka. Tulisan ini mengkaji kondisi ketahanan sosial masyarakat Entikong dalam menghadapi MEA tersebut. Dengan menggunakan kerangka Sustainable Livelihood Approach yang dimodifikasi, tulisan ini mengidentifikasi bahwa masyarakat Entikong memiliki empat modal ketahanan sosial yang kuat, yaitu modal alam, modal sosial, modal keuangan, dan modal politik/pemerintahan, serta dua modal yang masih lemah, yaitu modal fisik dan modal manusia. Selain itu, ketahanan sosial masyarakat Entikong juga dibantu dengan pelaksanaan kerja sama lintas Indonesia-Malaysia. Tulisan ini menyarankan reoptimalisasi kerja sama lintas batas dan pengaturan khusus perdagangan lintas batas di dalam MEA.

Kata Kunci: Entikong, ketahanan sosial, kerja sama lintas batas, Masyarakat Ekonomi ASEAN

DDC: 320.014

Ikrar Nusa Bhakti, Diandra Mengko

**INTELIJEN DALAM PUSARAN
DEMOKRASI DI INDONESIA PASCA
ORDE BARU**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 69-82

Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul “Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru”. Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.

Kata Kunci : Demokrasi, Intelijen, Indonesia, Politik, Pasca Orde-Baru

DDC: 352.14

Awani Irewati

**PROBLEMATIKA KERJA SAMA
PERBATASAN SEPANJANG SUNGAI
MEKONG ANTARA TIONGKOK DAN
ASEAN BAGIAN UTARA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 83-104

Selama berabad-abad, sungai Mekong telah menjadi pusat kehidupan orang enam negara riparian ini. Secara geografis, mengalir melalui negara-negara tersebut untuk sekitar 4.900 km. Ini menciptakan sebuah DAS 795.000 km², didistribusikan antara Upper Mekong River Basin yang terbentuk oleh China (21 persen) dan Myanmar (3 persen), serta Lower Mekong River Basin, yang terdiri Laos (25 persen), Thailand (23 persen), Kamboja (20 persen), dan Viet Nam (8 persen) (FAO, 2011). Untuk memenuhi kebutuhan orang-orang mereka sendiri di atas Sungai Mekong dan sub regional yang, negara-negara riparian telah mengembangkan beberapa inisiatif kerjasama lintas batas di antara mereka. Greater Mekong Subregion (GMS), Mekong Ricer Komisi [MRC] dll adalah contoh dari kerjasama lintas batas. Selain itu, ada beberapa kerjasama lain yang mencakup seluruh atau sebagian dari sub regional Mekong tetapi tidak secara khusus fokus pada Mekong River, yaitu ASEAN-China Free Trade Area dan Komunitas ASEAN. Kondisi ini menciptakan kompleksitas hubungan antara kerjasama di sub regional Mekong. Analisis tulisan ini beberapa potensi/masalah yang ada yaitu kemungkinan bahwa mereka kerjasama tumpang tindih; perbedaan profil negara-negara ‘tampaknya membuat kepentingan yang berbeda di antara mereka dll Analisis tersebut didasarkan pada beberapa penelitian lapangan di beberapa tempat (Vietnam, Laos, Thailand) pada tahun 2015.

Kata kunci: kerjasama lintas batas, negara-negara ASEAN Utara, RUPS, MRC, Sungai Mekong, konektivitas.

DDC: 352.14

Khanisa

**STRATEGI PENINGKATAN
PEMAHAMAN MASYARAKAT
TENTANG MASYARAKAT EKONOMI
ASEAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 105-118

ASEAN tengah merubah pendekatan institusinya dari top-to-bottom ke cara yang lebih memasyarakat. Penciptaan sebuah komunitas mendorong ASEAN untuk bersikap

lebih inklusif dalam implementasi program-programnya. Dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN, kesadaran dan pemahaman publik adalah faktor kunci yang menentukan apakah pillar ini akan dapat direalisasikan dengan sukses. Mengingat popularitas dari ASEAN dan kerangka-kerangkanya tidak diketahui secara signifikan di Indonesia, survei dan policy paper yang kemudian diterbitkan bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mulai di terapkan tahun lalu.

Kata Kunci : ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, Indonesia, Survei Publik.

DDC: 320.014

Nanto Sriyanto

**NEOTRADISIONALISME DAN
DISTOPIANISME: TINJAUAN ATAS
TIGA BUKU ROBERT D. KAPLAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 119-136

Artikel ini bertujuan menganalisa tulisan Robert D. Kaplan terutama yang terungkap dalam tiga publikasinya yaitu *The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War* (New York: Vintage Books. 2000), *The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate* (New York: Random House Publishing. 2013), dan *Asia's Cauldron: the South China Sea and the End of A Stable Pacific* (New York: Random House. 2014). Robert D. Kaplan dengan pendekatan geopolitik dan berlatar belakang sebagai wartawan yang mengalami langsung sejumlah perubahan penting pasca-Perang Dingin membawa pesan tentang negaran gagal yang mengancam stabilitas global, utamanya negara-negara maju (2000), kebangkitan pemikiran klasik geopolitik dalam dunia yang semakin padat dengan kekuatan yang terpolarisasi (2013), dan implikasinya terhadap kawasan Asia Timur sebagai kawasan yang rawan konflik. Dari ketiga publikasi Kaplan tersebut, penulis melihat pesan senada yang berwujud dalam bentuk bangkitnya pemikiran neotradisionalisme realis dalam hubungan internasional dan distopianisme. Di lain pihak, penulis juga melihat kekurangan dalam uraiannya yang populer dan menarik minat banyak pembaca dari kalangan luas, baik akademisi, aktivis LSM, bahkan pengambil keputusan, Kaplan terbilang tidak cukup mengupas

posisi teoritisnya dibandingkan teori yang ada yang menjadi diskursus akademik. Alih-alih memunculkan paparan yang holistik sebagaimana ia sebagai pengamat lapangan dan travel journalist menempatkan diri dalam setiap publikasinya, tulisan Kaplan harus dikritisi secara akademik karena tidak cukup utuh memberikan pandangan sebagaimana klaimnya yang banyak diungkap.

Kata Kunci: Robert D. Kaplan, geopolitik, realis neotradisionalisme, holistik, travel journalist

DDC: 324.2598

**David Putra Setyawan, Arwin Datumaya
Wahyudi Sumari**

**INDONESIA DEFENSE DIPLOMACY
IN ACHIEVING CYBERSECURITY
THROUGH ASEAN REGIONAL FORUM
ON CYBERSECURITY INITIATIVES**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 1-20

The development of information technology in the international world impacts to the use of cyberspace which covers all aspects of national life. Faced to this condition, Indonesian government needs to understand the state of cyber security and build it so that able to address any kind of threat which comes through cyberspace. In addition to internal conditions, the scope of the external noteworthy to be considered due the nature of cyber threats are transnational, cross the line of sovereignty, and has been seen as a common threat by the countries of the world. ASEAN has become a forum for Indonesia's to achieve national interests in order to support national security in the cyber field. Through the ASEAN Regional Forum (ARF) on cybersecurity initiatives, defense diplomacy strategy directed to increasing mutual trust (confidence building measures) between states and reduce any potential threats that may result from the external sphere. Those efforts, resulted in an agreement in the form of point of contacts between states and a shared vision for continuous training of cybersecurity in the form of seminars and workshops to build the capacity of human resources. Strategies and efforts are analyzed through a qualitative approach and primary data were collected through interviews with 15 informants from various government

agencies. In addition, literature, journals, and related documents are also used as supporting data.

Key Words: ARF, confidence building measures, cybersecurity, defense diplomacy

DDC: 324.2598

Fathimah Fildzah Izzati

**THE "MASS LAYOFFS":
ELECTRONICS INDUSTRY VALUE
CHAIN, AEC, AND CHALLENGES FOR
LABOUR MOVEMENT IN INDONESIA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 21-32

"Mass layoffs" issue has been rising in labour's political discourse in Indonesia since early 2016, following the announcement of economic policy package to face the Asean Economic Community (AEC). However, the word "mass" constructed in the issue goes against the employment data and is more closely related to political interests related to production in the electronics industry. On the other hand, labour movement issue in the electronics sector is also emerging along with the increase of labour market flexibility in this free market era, including the context of AEC. This study discusses the relationship between the mass layoffs issue, the implementation of AEC, and the labour movement in Indonesia, as well as the value chain of the electronics industry on the global level. It aims to show the role of labour movement in facing an economic scheme like AEC especially in electronics industry using value chain theory analysis. By using qualitative approach and literature review, the study found

that the labour movement in Indonesia has an excellent opportunity to build strength at the regional level by positioning themselves in the global value chain and flexible labour market regime.

Keywords: Mass layoffs, Value Chain, Electronics Industry, Labor Market Flexibility, AEC, Labour Movement.

DDC: 320.014

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar

**SPACE TRANSFORMATION AND
STAKEHOLDERS PARTICIPATION:
UNDERSTANDING INVOLVEMENTS
OF INDONESIAN CIVIL SOCIETY
ORGANISATIONS AND SMALL AND
MEDIUM ENTERPRISES IN POST-2003
REGIONALISM IN ASEAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 33-52

This article aims to explain the participation of stakeholders in the making of ASEAN Community after the regional political-economic transformation in 2003. The establishment of ASEAN Community, which is based on three pillars (politics & security, economics, social and cultural) has led to a more complex interactions between actors in the region. Before 2003, ASEAN has been perceived only as an 'international organisation', which is centered around the 'member states' as the only influential actor in the region. Following the establishment of ASEAN Community as a new form of regionalism in 2003, this article argues that the newly-established regional community has opened up spaces for contestations between the state and other new actors in the region, most notably business actors (both big businesses and small-and-medium enterprises) and civil society organisations. Drawn upon the critical perspective, this article argues that emerging interactions between actors in the region has been enabled by the transformation of space structure in ASEAN, that opened up spaces for contestations between stakeholders in the newly-transformed regional organisation. It thus leads to the more complex understanding of regionalism in Southeast Asia. The arguments provided will also be assessed by two case studies on the regionalisation of Human

Rights NGOs and Small-and-Medium Enterprises in Indonesia.

Keywords: regionalism, participation, stakeholders, ASEAN community, southeast asia, non-government organisations, small-and-medium enterprises.

DDC: 320.014

Sandy Nur Ikfal Raharjo

**THE SOCIAL RESILIENCE OF
INDONESIAN BORDER AREA
RESIDENTS TOWARDS THE ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY:
A STUDY IN ENTIKONG SUBDISTRICT,
WEST KALIMANTAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 53-68

ASEAN Economic Community (AEC) was formally come into force at the end of 2015, and will be further transformed to be more inclusive by 2025. To deal with this issue, the residents of Entikong subdistrict at the Indonesia-Malaysia borderland should have a strong social resilience. This article explain the author's work on the social resilience assessment of the Entikong residents towards the AEC implementation. By using a modified Sustainable Livelihood Approach, the result shows that Entikong residents have four adequate social resilience assets, namely natural capital, social capital, financial capital, and political capital. Unfortunately, they are still weak on physical and human capitals. This work also shows that cross-border cooperation implementation gives positive effects to the residents. For recommendation, cross-border cooperation should be re-optimized and a special treatment of border trade in AEC should be arranged.

Keywords: Entikong, Social Resilience, Cross-border Cooperation, ASEAN Economic Community.

DDC: 320.014

Ikrar Nusa Bhakti, Diandra Mengko

***INTELLIGENCE AND
DEMOCRATIZATION IN INDONESIA
POST NEW-ORDER***

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 69-82

Intelligence is an important and also complicated topic to study and understand because of its nature of secrecy. However, democracy always pushes the people to have at least basic comprehension of all government agencies, including the world of intelligence. Along with that spirit, Center for Political Studies, Indonesian Institute of Sciences (P2P-LIPI) was conducting research entitled "Intelligence and Democratization in Indonesia Post New-Order" in 2015. This research not only discuss about intelligence theories, but also intelligence experience in transitional democracy states, brief history of Indonesian intelligence, and initial review on democratization of intelligence in Indonesia. We argue that intelligence reform in Indonesia is a requisite. Intelligence should operate under democratic system and principles. Oversight mechanism would not weaken intelligence role -in contrast, it would enhance intelligence professionalism by gaining public support, legitimacy, and adequate budget.

Keywords: *Democracy, Intelligence, Indonesia, Politics, Post New-Order*

DDC: 352.14

Awani Irewati

***PROBLEMATIC BORDER COOPERATION
ALONG THE MEKONG RIVER BETWEEN
CHINA AND ASEAN NORTHERN***

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 83-104

For centuries, the Mekong river has become the center of six riparian countries's people life. Geographically, it flows through these countries for about 4,900 km. It created a 795,000 km² river basin, distributed between the Upper Mekong River Basin that is formed by China (21 percent) and Myanmar (3 percent), as well as the Lower Mekong River Basin, which comprised Laos (25 percent), Thailand (23 percent), Cambodia (20 percent), and Viet Nam (8 percent) (FAO, 2011). To fulfill their own people's needs over the Mekong River and its subregion, those riparian states have been developing some transboundary cooperation initiatives among them. Greater Mekong Subregion (GMS), Mekong Ricer Commission [MRC] etc. are examples of the transboundary cooperation. Besides, there are some other cooperations that cover the whole or part of the Mekong subregion but do not specifically focus on Mekong River; i.e. ASEAN-China Free Trade Area and ASEAN Community. This condition creates a complexity of relationships among the cooperations in the Mekong subregion. This paper analysis some potential/existing problems i.e. a possibility that those cooperations overlap; the differences in the countries' profile seem to create different interests among them etc. The analysis is based on some field research in some places [Vietnam, Laos, Thailand] in 2015.

Keywords: *transboundary cooperation, Northern ASEAN countries, GMS, MRC, Mekong River, connectivity.*

DDC: 352.14

Khanisa

***STRATEGY TO INCREASE PUBLIC
UNDERSTANDINGS ABOUT ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY***

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 105-118

ASEAN is gradually changing their approach from top-to-bottom to a more grassroots style institution. The idea of creating a community push ASEAN to be more inclusive in implementing its programmes. In realizing ASEAN Economic Community, public awareness and undertsndings is the key factor in whether the implementation of this ASEAN's pillar will succeed. Recalling that the popularity of

ASEAN and its frameworks are not significantly known in Indonesia, the survey and the policy paper that followed aim to find out the level of public understandings about ASEAN Economic Community which started to be implemented last year.

Keywords: ASEAN, ASEAN Economic Community, Indonesia, public survey.

DDC: 320.014

Nanto Sriyanto

**NEOTRADISIONALISME DAN
DISTOPIANISME: REVIEW FOR THREE
BOOKS OF ROBERT D. KAPLAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 119-136

*This article is to analyze three publications of Robert D. Kaplan, which consist of *The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War* (New York: Vintage Books. 2000), *The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate* (New York: Random House Publishing. 2013), and *Asia's Cauldron: the South China Sea and the End of A Stable Pacific* (New York: Random House. 2014). In those three publications, Kaplan utilizes geopolitical approach and embedded journalism in examining turbulent world in post-Cold War era. His arguments contain in the three books could be summarized as follows: failed states has threatened the stability the world, especially the prosperous developed countries (2000), resurgent of classical geopolitical thinking on tackling shrinking space yet polarized world politics (2013), implication on East Asia region as the volatile zone prone to conflict in the future. Based on the three publications, it could be seen that Kaplan is a proponent of neotraditional realism in IR studies, and it brings about dystopian thesis in those publications. Nevertheless it is discernible to note that despite his prosaic nature in almost of his writings that has attracted wider readership spread from academics, NGO's activists, and decision*

maker, Kaplan has not given enough space to discuss his theoretical position before he comes up with single theoretical perspective. Therefore, instead of giving a holistic picture about his subject in those three publications, his arguments and thesis which he claims based on embedded journalism and field observation should be criticised due to imbalance description and short-sighted conclusion.

Key Words: Robert D. Kaplan, geopolitic, neotradisionalism realist, holistic, travel journalist

**MEMBACA “PHK MASSAL”:
RANTAI NILAI INDUSTRI ELEKTRONIK, MEA, DAN TANTANGAN
BAGI GERAKAN BURUH DI INDONESIA**

***THE “MASS LAYOFFS”:
ELECTRONICS INDUSTRY VALUE CHAIN, AEC, AND CHALLENGES
FOR LABOUR MOVEMENT IN INDONESIA***

Fathimah Fildzah Izzati

Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 10 Jakarta Selatan 12710, Indonesia,
e-mail: fildzah.izzati@gmail.com

Diterima: 4 Mei 2016; direvisi: 20 Juni 2016; disetujui: 20 Juli 2016

Abstract

“Mass layoffs” issue has been rising in labour’s political discourse in Indonesia, especially in the electronics industry sector, since early 2016, following the announcement of economic policy package to face the Asean Economic Community (AEC). Although the term of “mass” constructed in the issue goes against the employment data, but it is still important to analyze this issue because it related to the politics of production in the electronics industry. In the context of AEC, the precariousness of labour movement in electronic sector is also emerging along with the increase of labour market flexibility in this free market era. This study discusses the relationship between the mass layoffs issue, the implementation of AEC, and the labour movement in Indonesia, as well as the value chain of the electronics industry on the global level. It aims to show the role of labour movement in facing an economic scheme of AEC especially in electronics industry using value chain theory analysis. By using qualitative approach and literature review, the study found that the labour movement in Indonesia has an excellent opportunity to build strength at the regional level by understanding their own position in the governance of the global value chain and flexible labour market regime.

Keywords: *Mass layoffs, Value Chain, Electronics Industry, Labor Market Flexibility, AEC, Labour Movement.*

Abstrak

“PHK Massal” sempat menjadi isu dalam politik perburuhan, khususnya di industri elektronik, pada awal tahun 2016 setelah kemunculan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dalam rangka menyambut peran/keterlibatan Indonesia dalam MEA. Meskipun konstruksi kata “massal” dalam isu PHK ini tidak sejalan dengan data ketenagakerjaan, namun penting untuk menganalisis isu ini karena terkait erat dengan politik dalam produksi industri elektronik. Dalam konteks MEA, kerentanan gerakan buruh di sektor elektronik pun kian meningkat seiring dengan meningkatnya fleksibilitas pasar tenaga kerja dalam rezim pasar bebas. Tulisan ini membahas hubungan antara isu PHK massal dengan rantai nilai industri elektronik di tingkat global, MEA, dan tantangan bagi gerakan buruh di Indonesia. Tujuannya untuk menunjukkan peran gerakan buruh dalam menghadapi skema ekonomi seperti MEA terutama di dalam industri elektronik melalui analisis teori rantai nilai. Dengan menggunakan metode kualitatif berupa studi literatur, tulisan ini menemukan bahwa gerakan buruh di Indonesia memiliki peluang yang besar untuk membangun kekuatan di tingkat regional dengan memahami posisi dirinya di dalam *governance* dari rantai nilai global dan rezim pasar tenaga kerja fleksibel.

Kata kunci: PHK Massal, Rantai Nilai, Industri Elektronik, Fleksibilitas Pasar, Tenaga Kerja, MEA, Gerakan Buruh

Pendahuluan

Pada awal 2016, dunia perburuhan di Indonesia sempat diramaikan dengan isu “PHK Massal” yang diungkapkan oleh serikat buruh seperti Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). “PHK Massal” yang dimaksud tersebut merujuk pada terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal terhadap ribuan buruh, termasuk yang bekerja di sektor industri elektronik. Sebelumnya, pada awal tahun 2015, dunia ekonomi Indonesia diramaikan dengan isu seputar *ASEAN Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang kemudian diikuti dengan turunnya 10 Paket Kebijakan Ekonomi yang diluncurkan secara bertahap hingga akhir tahun 2015.¹ Banyak spekulasi bermunculan, khususnya yang berkaitan dengan pembukaan pasar yang kian lebar di antara negara-negara ASEAN serta daya saing tenaga kerja.² Dalam dokumen resmi MEA pun dinyatakan bahwa dengan adanya MEA, alur investasi akan dibuka lebih luas dengan konsekuensi logis ala neoliberal yang menyertainya, yakni menghilangkan segala hal yang merintang investasi dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan investasi.

“...Create the necessary environment to promote all forms of investment and new growth areas into ASEAN...” (Southeast Asian Nations, 2008).³

Isu ini kemudian menjadi topik utama berbagai media massa, setidaknya hingga pertengahan tahun 2015. Dalam konteks Indonesia, MEA kemudian semakin kuat dikaitkan dengan “kesiapan” masyarakat dalam menghadapinya. Hasil survei yang dilakukan oleh LIPI pada tahun 2015 menyebutkan bahwa dari 2.509 responden di 16 provinsi, hanya

¹ “Delapan Paket Kebijakan Ekonomi”; diperoleh dari <http://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/delapan-paket-kebijakan-ekonomi/>; internet; diakses tanggal 3 Maret 2016.

² “Persiapkan MEA, Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Bagus”; diperoleh dari <http://redaksikota.com/2015/10/18/persiapkan-mea-paket-kebijakan-ekonomi-jokowi-bagus/#.VtaMK3194c1>; internet; diakses tanggal 17 Desember 2015.

³ (Terjemahan bebas: menciptakan lingkungan yang dibutuhkan dalam mendukung semua bentuk investasi dan wilayah baru pertumbuhan ekonomi ke dalam ASEAN). Sumber: Association of Southeast Asian Nations. *Asean Economic Community Blueprint* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2008), hal. 14.

25,9 persen yang mengetahui keberadaan MEA.⁴ Sebagai isu ekonomi, perbincangan mengenai MEA yang di dalamnya selalu menyoal permasalahan ketenagakerjaan pun tak dapat dilepaskan dengan politik perburuhan.⁵ Kesenambungan antara kedua isu tersebut kian terlihat paling tidak dalam dua momen gerakan buruh beberapa waktu belakangan ini, yakni pada akhir tahun 2015 dan awal tahun 2016. Pada akhir tahun 2015, dunia perburuhan Indonesia sempat diramaikan oleh penolakan serikat buruh atas Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 mengenai pengupahan.⁶ Kemudian, pada awal tahun 2016, muncul isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, yang juga meresahkan kaum buruh.

Dalam rilis yang dikeluarkan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), disebutkan bahwa PP 78/2015 mengenai pengupahan dianggap merugikan buruh karena bertentangan dengan pasal 88 dan 89 UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan.⁷ Sementara itu, wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa pimpinan serikat buruh di Bandung, Bekasi dan Jakarta pun menunjukkan bahwa PP 78/2015 ini ditolak oleh serikat-serikat buruh dengan berdasarkan pada beberapa alasan, termasuk penentuan upah tidak lagi didasarkan pada Komponen Hidup Layak (KHL) dan dilakukan selama 5 (lima) tahun sekali, sehingga

⁴ Newsletter FORWARD volume 2 tahun 2015; diperoleh dari <http://www.politik.lipi.go.id/download/category/1-newsletter-forward>; internet; diakses tanggal 15 Maret 2016.

⁵ Terkait hal ini, salah satunya dapat dilihat pada sebuah seminar yang diselenggarakan di FISIP Universitas Indonesia pada tanggal 5 Mei 2015 mengenai Politik Perburuhan dan Tantangan Indonesia dalam menghadapi MEA.

⁶ Lihat “Ini Tujuh Alasan Buruh Tolak PP Pengupahan”; diperoleh dari <http://news.okezone.com/read/2015/11/20/338/1252831/ini-tujuh-alasan-buruh-tolak-pp-pengupahan> “5 Alasan Tolak PP Pengupahan”; diperoleh dari <http://www.bantuanhukum.or.id/web/5-alasan-tolak-pp-pengupahan-penjelasan-lengkap/>; “PP Pengupahan Terus Mendapat Penolakan Pekerja dan Buruh”; diperoleh dari <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/10/27/347680/pp-pengupahan-terus-mendapat-penolakan-pekerja-dan-buruh>; internet; diakses tanggal 5 Maret 2016.

⁷ “Long March Bandung- Jakarta, Ratusan Buruh Sebarkan Satu Juta Petisi Tolak PP 78/2015”; diperoleh dari <http://www.kspi.or.id/long-march-bandung-jakartaratusan-buruh-sebarkan-satu-juta-petisi-tolak-pp-782015.html>; internet; diakses tanggal 22 November 2015.

meningkatkan kerentanan hidup kaum buruh.⁸ Meski demikian, tidak banyak serikat buruh yang mengaitkan aturan baru mengenai pengupahan ini dengan paket kebijakan ekonomi secara langsung. Padahal, konteks kemunculan PP tersebut ada di dalam skema Paket Kebijakan Ekonomi (terutama tahap II) yang orientasi utamanya ditujukan bagi kepentingan dunia investasi, salah satunya dalam manifestasi menekan upah buruh.⁹

Selanjutnya, pada awal tahun 2016, perlawanan terhadap PP mengenai pengupahan tersebut relatif tidak terdengar lagi, semenjak munculnya isu yang lebih besar, yakni Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) “massal”. Belakangan, dalam dua bulan awal tahun ini, berbagai berita di media massa menyebutkan bahwa PHK massal terjadi di berbagai perusahaan, terutama di sektor pertambangan, migas, elektronik, dan otomotif, seperti di PT. Panasonic dan PT. Toshiba.¹⁰ Jumlah buruh yang di-PHK pun disebutkan hingga puluhan ribu dan berkembang anggapan bahwa jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang akan hengkang dari Indonesia.¹¹

Pengusaha, buruh dan pemerintah memiliki perspektif yang berbeda-beda terkait isu “PHK massal” ini. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyatakan bahwa PHK massal terjadi karena banyaknya kerugian yang dialami berbagai perusahaan akibat penerapan kebijakan upah minimum yang tinggi sehingga menyebabkan banyak perusahaan tidak sanggup membayarkan upah para karyawannya.¹² Sementara itu, serikat

buruh KSPI menyatakan bahwa PHK massal terjadi akibat hengkangnya beberapa perusahaan elektronik Jepang yang kemudian digantikan oleh perusahaan-perusahaan yang berasal dari Tiongkok.¹³ Di sisi lain, negara menyatakan tidak ada PHK massal sebagaimana yang dikabarkan di media beberapa waktu belakangan.¹⁴

Adanya konstruksi kata “massal” dalam isu mengenai PHK awal tahun 2016 ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut karena beberapa hal. *Pertama*, data yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja RI menyebutkan bahwa selama tahun 2015, sebanyak 48.843 buruh ter-PHK.¹⁵ Menjadi menarik untuk mengulas lebih jauh fenomena “PHK massal” ini, mengingat data Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) menyebutkan bahwa pada tahun 2008, terdapat setidaknya 633.000 orang buruh yang ter-PHK.¹⁶ Dari sini dapat dilihat bahwa jumlah buruh ter-PHK pada tahun 2015 jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah buruh ter-PHK pada tahun 2008.¹⁷ Selain itu, PHK bukanlah fenomena unik dalam politik perburuhan yang hanya terjadi dalam momen tertentu. PHK selalu menjadi ancaman bagi kaum buruh Indonesia, terutama semenjak pemberlakuan sistem kerja kontrak dan *outsourcing* sebagai sistem kerja khas dari rezim fleksibilitas pasar tenaga kerja diberlakukan hampir di seluruh Indonesia.¹⁸

diperoleh dari <http://www.kemenperin.go.id/artikel/7182/Cegah-PHK-Massal,-Rumusan-UMP-akan-Direvisi>; internet; diakses tanggal 3 Maret 2016.

¹³ Keterangan diperoleh dari Iswandi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dalam diskusi PRP pada tanggal 1 Maret 2016.

¹⁴ “Istana Bantah Ada PHK Massal di RI”; <http://bisnis.liputan6.com/read/2428593/istana-bantah-ada-phk-massal-di-ri>; internet; diakses tanggal 3 Maret 2016.

¹⁵ Pusat Data dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja RI. (2015). *Data Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia menurut Provinsi tahun 2015*; diperoleh dari <http://pusdatin.naker.go.id>; internet; diakses tanggal 5 Maret 2016.

¹⁶ Abu Mufakhir (2016). “PHK Massal dan Akumulasi Kapital”; diperoleh dari <http://majalahsedane.org/phk-massal-dan-akumulasi-kapital/>.

¹⁷ Salah satu penyebabnya akibat krisis ekonomi ketika itu. Lihat Abu Mufakhir, (2016). *Ibid*.

¹⁸ Fathimah Fildzah Izzati (2014). *Politik Serikat Buruh dan Kaum Precariat: Pengalaman Tangerang dan Karawang*. Jakarta: Departemen Ilmu Politik FISIP UI dan Puskapol FISIP UI, hlm.

⁸ Wawancara Fathimah Fildzah Izzati dengan 3 pimpinan serikat buruh, dilakukan pada bulan November 2015.

⁹ “Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Diminta Tingkatkan Daya Saing”; diperoleh dari <http://economy.okezone.com/read/2015/10/16/320/1232860/paket-kebijakan-ekonomi-jokowi-diminta-tingkatkan-daya-saing>; internet; diakses tanggal 22 November 2015.

¹⁰ “BPS: Kekhawatiran PHK Massal Berlebihan”; diperoleh dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2425997/bps-kekhawatiran-phk-massal-berlebihan/>; internet; diakses tanggal 27 Februari 2016.

¹¹ “Panasonic dan Toshiba Hengkang, Jokowi Harus Antisipasi PHK Massal.”; diperoleh dari <http://ekonomi.rimanews.com/investasi/read/20160204/259827/Panasonic-dan-Toshiba-Hengkang-Jokowi-Harus-Antisipasi-PHK-Massal>; internet; diakses tanggal 15 Maret 2016.

¹² “Cegah PHK Massal, Rumusan UMP akan Direvisi”;

Kedua, kendati “PHK massal” diberitakan menimpa buruh di berbagai sektor, cenderung hanya ada satu serikat buruh, yakni KSPI, yang diberitakan media massa mengalami keresahan terkait yang isu PHK massal.

Berdasarkan paparan di atas, terdapat beberapa masalah yang penulis identifikasi terkait isu “PHK massal” yang tengah ramai di dunia perburuhan saat ini. *Pertama*, penulis tidak melihat “PHK massal” ini sebagai fenomena khusus yang terjadi akibat penetapan UMK yang terlalu tinggi. *Kedua*, isu “PHK massal” yang berkaitan dengan sektor elektronik, yang di antaranya menjadi cakupan dari serikat buruh KSPI, merupakan isu politis. *Ketiga*, munculnya isu “PHK massal” ini berkaitan dengan isu MEA sehingga serikat buruh seperti KSPI juga memunculkan isu pekerja dari Tiongkok seiring dengan kemunculan isu “PHK massal” ini. *Keempat*, penulis melihat kerentanan sekaligus tantangan bagi gerakan buruh dalam kaitannya dengan MEA yang menjadi konteks dari munculnya beberapa masalah yang dihadapi kaum buruh. Sebelumnya, analisis mengenai isu “PHK Massal” di antaranya pernah ditulis oleh Abu Mufakhir (2016), yang menghubungkan isu “PHK massal” ini dengan industrialisasi nasional yang masih lemah.¹⁹ Berbeda dengan tulisan tersebut, tulisan ini membahas isu PHK massal dalam kaitannya dengan rantai nilai industri elektronik di tingkat global, MEA, dan tantangan bagi gerakan buruh di Indonesia. Tepatnya, tulisan ini menganalisis bagaimana MEA mempengaruhi kondisi kerja buruh dalam rantai nilai industri elektronik di tingkat global serta bagaimana posisi gerakan buruh Indonesia di tengah kondisi tersebut.

Tulisan ini menggunakan dua kerangka konseptual, yaitu konsep mengenai rantai nilai global (*global value chain*) dan pasar tenaga kerja fleksibel. Secara umum, pengaturan atau *governance* dari rantai nilai industri di tingkat global memiliki pola yang dinamis, dimana pola tersebut secara kuat diasosiasikan dengan industri-industri tertentu. Dalam hal ini, tidak ada pola pengaturan rantai nilai industri global yang bersifat monolitik. Sebaliknya, *nature* dari rantai nilai global ini sangat dinamis dan

seringkali mengalami tumpang tindih.²⁰ Pola rantai nilai global yang sangat dinamis ini kemudian menjadikan fleksibilitas pasar tenaga kerja sebagai rezim utama hubungan kerja sejak tahun 1980an hingga saat ini. Dalam pasar tenaga kerja fleksibel yang di antaranya dicirikan dengan hubungan kerja yang penuh dengan ketidakadilan bagi kaum buruh²¹—seperti kontrak dan *outsourcing*—ini, posisi gerakan buruh pun semakin dipenuhi dengan kerentanan.²²

Akumulasi Kapital dan Rantai Nilai Industri Elektronik di Tingkat Global

Di luar faktor krisis, faktor yang membuat isu PHK tahun 2016 dikonstruksi sebagai PHK yang terjadi secara “massal”, terkait erat dengan faktor dimana PHK terjadi di perusahaan-perusahaan elektronik dengan rantai nilai yang ada di tingkat global. Dalam hal ini, analisis mengenai isu “PHK massal” dijangkarkan pada rantai nilai industri elektronik di tingkat global. Beranjak dari hal tersebut, pembahasan dalam bagian ini difokuskan pada pembahasan mengenai rantai nilai industri di tingkat global, khususnya industri elektronik dimana nantinya ditunjukkan kaitan antara isu “PHK massal” ini dengan konteks ekonomi politik rantai nilai industri elektronik di tingkat global dan Asia.

Pembentukan rantai nilai industri di tingkat global²³ terkait erat dengan strategi neoliberalisme²⁴ dalam mengakumulasi

²⁰ Gary Gereffi, John Humphrey, & Timothy Sturgeon (2005). The Governance of Global Value Chains. *Review of International Political Economy*, 12(1), 78–104. Diperoleh dari <http://doi.org/10.1080/09692290500049805>.

²¹ Lihat Guy Standing (1999). *Global Labour Flexibility: Seeking Distributive Justice*. New York: ST Martin’s Press Inc.

²² Andreas Bieler, Ingemar Lindberg, & Devan Pillay (Eds.). (2008). *Labour and the Challenges of Globalization: What Prospects for Transnational Solidarity*. London: Pluto Press, hal. 1-22.

²³ Pengertian rantai nilai industri di tingkat global (*global value chain*) merujuk pada pembagian proses produksi dan distribusi barang yang dilakukan oleh berbagai perusahaan berbeda dengan lokasi yang berbeda di berbagai negara di dunia (Lihat Gereffi, Gary, John Humphrey, Timothy Sturgeon, *Published Taylor, Gary Gereffi, and Timothy Sturgeon*. 2016. “The Governance of Global Value Chains” 12 (1): 78–104. Diperoleh dari doi:10.1080/09692290500049805).

²⁴ Neoliberalisme dilihat sebagai perluasan dari ekonomi

¹⁹ Abu Mufakhir (2016). *Op.Cit.*

kapital di seluruh dunia.²⁵ Meningkatnya pasar finansial global yang diekspresikan melalui peningkatan organisasi produksi transnasional serta informalisasi dan deregulasi pasar tenaga kerja serta dominannya ideologi neoliberal menjadi fase dari globalisasi ekonomi saat ini.²⁶ Terkait itu, kapital finansial global mengakumulasi surplus di seluruh dunia, khususnya di negara-negara berkembang, seperti negara-negara yang berada di Asia. Ekspansi rantai nilai dalam industri di berbagai negara pun berbeda-beda bergantung pada keuntungan harga kompetitif berbagai faktor produksi, seperti 1) upah buruh yang rendah, 2) bahan-bahan mentah, 3) infrastruktur, 4) harga-harga administratif, 5) pasar yang lebih luas atau pasar barang-barang produksi yang lebih terintegrasi, dan 6) basis pabrik yang sudah ada dan mampu untuk menyediakan *tier-II* dan *tier-III suppliers*.²⁷

Dalam konteks itu, Asia merupakan tempat yang penting dalam *global factories* atau pabrik global. Dalam pabrik global, kantor-kantor perusahaan berada/berlokasi di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat (AS), negara-negara di Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Sementara itu, proses produksi berada di puluhan ribu pabrik yang berlokasi di negara-negara yang cenderung memberlakukan politik upah rendah, seperti Thailand, Indonesia, Tiongkok, Filipina, Bangladesh, Kamboja, India, dan sebagainya.²⁸

Integrasi Asia ke dalam rantai nilai global sendiri dimulai dengan masuknya Jepang,²⁹

neoklasik melalui program-programnya yang di antaranya memusatkan perhatiannya pada pembentukan sebuah sistem politik dimana pasar dilindungi dari politik dengan pembuatan regulasi yang efektif bagi pasar (lihat Robison, Richard. 2006. “*The reordering of Pax Americana How does Southeast Asia fit in?*” In *Empire and Neoliberalism in Asia*, 52-68. Diedit oleh Vedi R. Hadiz. Oxon: Routledge.

²⁵ Lihat Surendra Pratap (2014). *Emerging Trends in Factory Asia: International Capital Mobility, Global Value Chain, and the Labour Movement*. Hong Kong: Asia Monitor Resource Centre.

²⁶ Andreas Bieler, Ingemar Lindberg, & Devan Pillay (Eds.). (2008). *Op.Cit.*, hal. 2-8.

²⁷ Surendra Pratap (2014). *Op.Cit.*, hal. 50.

²⁸ *Ibid.*, hal. 36.

²⁹ Jepang mengambil porsi dominan dalam industri elektronik di tahun 1990an dimana industri elektronik di Asia Timur sendiri

Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan Korea Selatan ke dalam *global supply chain* atau rantai nilai pasokan di tingkat global.³⁰ Pada rentang waktu 1970-an hingga 1980-an, perusahaan-perusahaan Korea Selatan, Hongkong, Taiwan, dan Singapura pun meningkatkan produksi alih daya (*outsourcing*) mereka ke lokasi-lokasi dengan biaya murah di Asia Timur dan Asia Tenggara, seperti Malaysia, Filipina, Thailand, Indonesia, Vietnam serta lokasi-lokasi lainnya.³¹ Berkaitan dengan itu, industri elektronik pun berkembang menjadi industri yang paling cepat berkembang di Asia.³² Negara-negara di Asia, seperti Vietnam, India, dan Indonesia, menjadi magnet bagi pembentukan industri elektronik karena faktor berlimpahnya bahan baku serta berlakunya politik upah murah. Sebagai penyedia *tier II* hingga *IV*, perusahaan-perusahaan manufaktur yang beroperasi di negara-negara berkembang mengerjakan pesanan dari perusahaan-perusahaan elektronik pemilik lisensi yang berbasis di negara-negara maju seperti Korea Selatan dan Tiongkok.³³ Oleh karena itu, industri elektronik dikenal sebagai industri yang paling berhasil membangun rantai pasokan di seluruh dunia. Selain itu, 50% ekspor elektronik pun berasal dari negara-negara Asia, khususnya negara-negara anggota ASEAN yang juga merupakan target pemasaran produk-produk elektronik paling potensial.³⁴

Struktur rantai nilai global dalam industri elektronik di Asia sendiri terdiri atas OBM/perusahaan utama (AS, Eropa Barat, Jepang) yang membawahi *platform leaders*/perusahaan yang memiliki teknologi krusial seperti

mengambil 53,3% dari total produksi di seluruh dunia (Lihat Kearney, Kathleen, Sanjiv Pandita, and Fahmi Panimbang, eds. 2013. *Labor Rights in High Tech Electronics: Case Studies of Workers' Struggles in Samsung Electronics and Its Asian Suppliers*. Hong Kong: Asia Monitor Resource Centre).

³⁰ Surendra Pratap (2014). *Op.Cit.*, hal. 43.

³¹ *Ibid.*, hal. 44.

³² Kathleen Kearney, Sanjiv Pandita, & Fahmi Panimbang (Eds.). (2013). *Op.Cit.*, hal. 12.

³³ Biasanya berupa komponen-komponen “sederhana” dari produk elektronik.

³⁴ Kathleen Kearney, Sanjiv Pandita, & Fahmi Panimbang (Eds.). (2013). *Op.Cit.*, hal.11.

software, hardware, atau kombinasi keduanya yang digunakan berbagai produk perusahaan-perusahaan lain; kemudian perusahaan yang memproduksi desain semikonduktor (Taiwan). Di bawah struktur itu ada *Contract Manufacturers* (CMs)/perusahaan kontrak yang terdiri atas 1). *Original Design Manufacturers* (ODMs)/pabrik yang merancang desain asli (Taiwan) dan 2). *Original Equipment Manufacturers* (OEMs)/pabrik peralatan asli dengan pabrik-pabrik berada di Taiwan, Singapura, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sementara itu, penyedia *tier-I* biasanya ada di negara-negara berkembang dari negara-negara maju dan negara-negara industri baru. Terakhir, penyedia *tier II, III, dan IV* berbasis di negara-negara berkembang.³⁵ Struktur ini merupakan cerminan dari luasnya spektrum proses yang ada di dalam industri elektronik dimana di antaranya mencakup fabrikasi semikonduktor hingga perakitan produk-produk elektronik.³⁶

Kemudian, proses integrasi dan perubahan ekonomi dunia telah menjadikan beberapa negara di Asia Tenggara sebagai lokus dari industri elektronik.³⁷ Pembentukan rantai nilai industri elektronik di Asia Tenggara dimulai dengan perusahaan-perusahaan AS, khususnya perusahaan nasional semikonduktor dan instrumen di Texas, yang membuat *plants* di Singapura untuk merancang bangun peralatan-peralatan semikonduktor.³⁸ Singapura kemudian menjadi negara maju pertama yang menjadi pusat dari proses dan ekspor industri elektronik, dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya.³⁹ Hal ini pun mempengaruhi kebijakan berbagai negara di ASEAN yang mana di dalamnya mencakup kebijakan

untuk mendorong integrasi regional.⁴⁰ Selain itu, perkembangan ini juga mempengaruhi pembentukan industri elektronik di negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Di Malaysia, *Multi National Corporation* (MNC) menjadi pemain kunci dalam industri elektronik dimana ekspor industri elektronik Malaysia terus mengalami peningkatan semenjak tahun 1970an, dari 1,8% menjadi 50% menjelang akhir tahun 1980an.⁴¹ Strategi ekonomi Malaysia dalam bidang industri yang secara khusus ditujukan untuk menarik investasi asing, terutama dari Inggris, juga berlaku dalam industri elektroniknya. Investasi asing yang meningkat khususnya pada kurun waktu 2007-2011 membuat 365 perusahaan elektronik tertarik untuk beroperasi di Malaysia.⁴²

Sementara itu, masuknya Vietnam ke dalam keanggotaan *World Trade Organization* (WTO) mempengaruhi masuknya proyek-proyek besar dalam industri elektronik ke Vietnam. Selain itu, sebagaimana juga terjadi di negara-negara lainnya, pembentukan industri elektronik di Vietnam didukung oleh berbagai kebijakan yang pro terhadap investasi.⁴³ Kemudian, pembentukan industri elektronik di Filipina dimulai pada tahun 1970-an dan pada pertengahan 1990-an Filipina muncul sebagai lokasi utama bagi perakitan teknologi intensif dan manufaktur ujicoba dari semikonduktor dan perangkat keras komputer.⁴⁴ Pada sisi lain, Thailand yang merupakan basis terbesar di ASEAN dalam hal produksi elektronik bagi MNC-MNC dari negara-negara seperti Jepang, Korea, Amerika, dan Eropa, pembentukan industri elektroniknya tidak dapat dilepaskan dari fase pertama industrialisasi di sana pada tahun 1960-an. *Free Trade Area* (FTA) di Thailand juga mempengaruhi perkembangan industri elektronik di Thailand.⁴⁵

³⁵ Surendra Pratap (2014). *Op. Cit.*, hlm. 60.

³⁶ D. Koh, G. Chan, & E. Yap (2004). World at Work: The Electronics Industry. *Occupational and Environmental Medicine*, 61(2), 180–183. Diperoleh dari <http://www.jstor.org/stable/27732187>.

³⁷ Lihat Kathleen Kearney, Sanjiv Pandita, & Fahmi Panimbang (Eds.). (2013). *Op.Cit.*, hal. 8-12.

³⁸ Surendra Pratap (2014). *Op. Cit.*, hal. 43.

³⁹ Ian Chalmers (1991). International and Regional Integration: The Political Economy of the Electronics Industry in ASEAN. *ASEAN Economic Bulletin*, 8(2), 194–209. Diperoleh dari <http://www.jstor.org/stable/25770367>.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Kathleen Kearney, Sanjiv Pandita, & Fahmi Panimbang (Eds.). (2013). *Op.Cit.*, hal. 169.

⁴³ *Ibid*, hal. 143-145.

⁴⁴ Steven C. McKay (2006). *Satanic Mills or Silicon Islands? The Politics of High-Tech Production in the Philippines*. Ithaca: Cornell University Press, hal. 43-44.

⁴⁵ Kathleen Kearney, Sanjiv Pandita, & Fahmi Panimbang

Konteks Indonesia

Bagaimana dengan di Indonesia? Pembentukan industri elektronik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebijakan liberalisasi dan deregulasi yang menarik investasi asing yang mulai diberlakukan pada masa Orde Baru Soeharto. Pada masa itu, dikeluarkan dua kebijakan, yakni 1) larangan impor produk-produk elektronik dalam bentuk barang sudah jadi; 2) menarik perusahaan-perusahaan asing masuk ke Indonesia sebagai *join venture partners* dengan perusahaan-perusahaan lokal. Pada akhir tahun 1978, ekspor elektronik Indonesia meningkat dan mengambil porsi sebesar 15% dari total ekspor manufaktur Indonesia. Kemudian, melalui kebijakan *May Package* di tahun 1990, ekspor elektronik meningkat setelah kebijakan deregulasi tersebut berhasil menarik masuk investor dari Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Indonesia pun menjadi lapisan ke empat (*tier IV*) dari industri elektronik dan masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara Asia tenggara lainnya seperti Filipina, Malaysia, dan Thailand.⁴⁶

Selain itu, perkembangan industri elektronik di Indonesia pun tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan perkembangan ekonomi global dimana pabrik-pabrik direlokasi ke tempat-tempat atau negara-negara dengan upah yang lebih murah. Kebijakan pintu terbuka oleh negara yang dimaksudkan untuk mengurangi halangan struktural bagi masuknya modal asing menjadikan industri elektronik sebagai prioritas sejak tahun 2008. Insentif yang diberikan pemerintah berupa ketersediaan buruh murah di Indonesia telah menarik 250 perusahaan elektronik dengan komposisi 10 perusahaan besar elektronik (4 (empat) diantaranya merupakan perusahaan dari Jepang, 2 (dua) dari Korea Selatan dan 1 (satu) perusahaan dari Cina) untuk beroperasi di Indonesia.⁴⁷

Berdasarkan penjelasan pada bagian ini, dapat dilihat bahwa analisis terhadap isu “PHK Massal” yang terjadi di Indonesia, khususnya yang terjadi di perusahaan-perusahaan elektronik, tidak dapat dilepaskan dari konteks

(Eds.). (2013). *Op.Cit.*, hal. 200-201.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 54.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 55.

bahwa perusahaan-perusahaan elektronik yang beroperasi di Indonesia, seperti Toshiba dan Panasonic, memiliki rantai nilai dimana konsekuensinya harus dibaca dalam konteks global dan Asia. Kondisi ini seyogyanya juga dapat dibaca oleh gerakan buruh di Indonesia sehingga gerakan buruh di Indonesia dapat membangun strategi gerakan mereka dengan mengaitkannya pada politik produksi di masing-masing sektor. Dalam konteks ini, politik produksi berupa rantai nilai industri yang berlaku di sektor industri elektronik.

Karakter dinamis yang melekat dalam rantai nilai global telah memungkinkan perusahaan-perusahaan dalam industri elektronik mengatur pola *governance* dari rantai nilai sesuai dengan kebutuhan akumulasi kapital di dalamnya.⁴⁸ Sehubungan dengan itu, alasan adanya “PHK Massal” yang terjadi di Panasonic dan Toshiba karena adanya relokasi pabrik⁴⁹ dan merger perusahaan⁵⁰ dapat dibaca dalam beberapa hal. *Pertama*, adanya relokasi pabrik Panasonic dan Toshiba dapat dibaca sebagai bagian dari upaya kedua perusahaan tersebut untuk kian mendekatkan lokasi pabrik perusahaan demi membentuk rantai pasokan yang terintegrasi sehingga dapat mengurangi ongkos distribusi.⁵¹ *Kedua*, adanya merger perusahaan dapat dibaca sebagai upaya untuk melakukan efisiensi produksi dengan meminimalisir biaya (*cost*) dari sisi buruh/pekerja dengan memberlakukan “PHK massal”.

⁴⁸ Gary Gereffi, John Humphrey, & Timothy Sturgeon (2005). The Governance of Global Value Chains. *Review of International Political Economy*, 12(1), 78–104. Diperoleh dari <http://doi.org/10.1080/09692290500049805>.

⁴⁹ “Toshiba dan Panasonic Tak Hengkang dari Indonesia, hanya Relokasi Pabrik”; diperoleh dari <http://jateng.tribunnews.com/2016/02/04/toshiba-dan-panasonic-tak-hengkang-dari-indonesia-hanya-relokasi-pabrik-hanya-Relokasi-Pabrik>”; diperoleh dari <http://jateng.tribunnews.com/2016/02/04/toshiba-dan-panasonic-tak-hengkang-dari-indonesia-hanya-relokasi-pabrik>”; internet; diakses tanggal 27 Maret 2016.

⁵⁰ “Gobel: Panasonic tidak tutup pabrik, tapi me-merger bisnis lampu”; diperoleh dari <http://www.antaranews.com/berita/543476/gobel-panasonic-tidak-tutup-pabrik-tapi-me-merger-bisnis-lampu>; internet; diakses tanggal 27 Maret 2016.

⁵¹ Sebagaimana yang terjadi di Cikarang-Bekasi. Lihat Kathleen Kearney, dkk. *Labor Rights in High Tech Electronics*, *Op.Cit.*, hal. 60-64.

Selain itu, penyediaan iklim investasi yang kondusif sebagaimana yang selalu diupayakan negara sebagai konsekuensi dari MEA yang tercermin melalui paket kebijakan ekonomi, khususnya paket II, tidak selalu dapat dibaca sebagai konsekuensi dari adanya kecemasan bahwa investasi akan hengkang dari Indonesia tanpa iklim investasi yang ramah terhadap para investor. Lebih dari itu, banyaknya kebijakan yang memungkinkan penyediaan iklim investasi yang kondusif dapat dijadikan justifikasi bagi perusahaan termasuk perusahaan elektronik untuk melakukan berbagai strategi dalam menjaga kestabilan rantai nilai (*value chain*) dan rantai nilai pasokan mereka, termasuk melakukan relokasi pabrik atau melakukan efisiensi perusahaan yang mana selalu mengorbankan kehidupan kaum buruh, dalam hal ini di dalamnya termasuk berupa PHK.

Pasar Tenaga Kerja Fleksibel, MEA, dan Gerakan Buruh di Indonesia

Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, fenomena PHK dalam dunia politik perburuhan dan hubungan industrial berkait erat dengan berlakunya pasar tenaga kerja fleksibel sebagai rezim utama hubungan kerja hingga saat ini. Pasar tenaga kerja fleksibel sebagai bagian dari mekanisme akumulasi kapital ini berlaku hampir di seluruh dunia. Terkait hal tersebut, kapital di negara-negara maju membutuhkan tenaga kerja terlatih yang mana hampir semuanya berasal dari negara-negara berkembang dengan upah sangat rendah. Dalam konteks rezim kapital internasional ini, kemudian muncul kecenderungan baru dalam industrialisasi dimana jumlah tenaga kerja cadangan di negara-negara maju kian meningkat dan berdampak pada tekanan upah dan kekuatan kolektif buruh. Dalam hal ini, yang terjadi pada mayoritas pekerja di dunia dalam rezim kapital internasional adalah ketika kapital berjalan lancar, mereka bekerja. Namun, ketika kapital menurun, mereka menganggur.⁵² Meningkatnya *accumulation by dispossession* (Harvey, 2012)⁵³ melalui perampasan tanah juga

⁵² Surendra Pratap (2014). *Op.Cit.*, hal. 33.

⁵³ Istilah ini di antaranya dikemukakan David Harvey. *Accumulation by dispossession* (akumulasi melalui perampasan) adalah mekanisme akumulasi kapital dengan

meningkatkan jumlah tenaga kerja cadangan di negara-negara berkembang, selain juga menghasilkan kerusakan massal dalam kehidupan dan pergeseran populasi.⁵⁴

Dalam hal ini, proses akumulasi primitif yang ditandai dengan berlangsungnya pengusiran rakyat dari basis produksinya terjadi secara besar-besaran serta maraknya penswastaan lahan, hutan, air, sumber daya alam, tambang, serta sektor publik lainnya membuat rakyat terusir dari lingkungan tempat mereka hidup.⁵⁵ Kondisi yang sedemikian itu kemudian diperparah dengan munculnya fleksibilitas tenaga kerja yang berkelindan erat dengan sejarah mobilitas kapital itu sendiri. Dalam hal ini, informalisasi pekerja dan fleksibilitas tenaga kerja pun meningkat pada fase terakhir tahun 1990-an dimana fase baru dari dunia yang terglobalisasi dimulai.⁵⁶

Proses integrasi antara kapital nasional dan internasional serta pembangunan rezim ekonomi-politik global baru membuat kapital tumbuh menjadi lebih kuat, namun di sisi lain gerakan buruh mengalami penurunan secara keseluruhan.⁵⁷ Di samping itu, sistem produksi yang fleksibel juga dibutuhkan untuk menciptakan hubungan kerja yang fleksibel. Buruh bisa direkrut ketika dibutuhkan atau dipecat ketika tidak dibutuhkan sehingga menciptakan ketiadaan jaminan pekerjaan.⁵⁸ Sistem kerja fleksibel semacam itu dapat berupa sistem kerja kontrak dan *outsourcing*. Kebanyakan buruh yang berada di bawah sistem kerja yang fleksibel itu pun bekerja dalam sistem kerja yang intensif di lingkungan industri yang merusak.⁵⁹ Fleksibilitas tenaga kerja tersebut kemudian diikuti dengan mobilitas buruh yang dikontrol dan diregulasi. Dalam hal ini, tanpa bermaksud anakronistik, dalam konteks

menyingkirkan rakyat miskin dari pembangunan; lihat, David Harvey, *Rebel Cities: From the Right to the City to Urban Revolution* (Verso Books, 2012), hal. 34.

⁵⁴ Surendra Pratap (2014). *Op.Cit.*, hal. 33.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 102-103.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 24.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 27.

⁵⁸ Lihat Guy Standing (2011). *The Precariat: The New Dangerous Class*. London: Bloomsbury Academic.

⁵⁹ Surendra Pratap (2014). *Op.Cit.*, hal. 36.

Indonesia, praktik kontrol gerakan buruh oleh negara sudah terjadi semenjak masa kolonial.⁶⁰

Dengan adanya pembagian kerja internasional baru dalam rantai nilai global, informalisasi tenaga kerja semakin meluas dan integrasi sektor informal dalam rantai nilai terjadi bersamaan dengan institusionalisasi mobilitas kapital global serta kemunculan dinamika ekonomi politik terkait lainnya. Kondisi ini membuat pengorganisasian gerakan buruh menjadi semakin sulit dan rumit. Terkait itu, menurut Michael Burawoy, pengorganisasian kerja memang memiliki dampak politis dan ideologis yang dapat dengan mudah dilihat, misalnya, pada dinamika gerakan buruh di dalamnya (Burawoy, 1985).⁶¹ Para pekerja dalam jumlah besar yang berasal dari negara-negara berkembang banyak menemui problem serius di negara-negara tujuan. Mereka nekat melakukan migrasi karena adanya kesenjangan sangat tinggi antara upah yang berlaku di negara maju dan negara berkembang.⁶²

Dalam konteks pemberlakuan MEA, mobilitas buruh yang terjadi di dalam sengkabut rezim fleksibilitas pasar tenaga kerja menghadapi tantangan kaitannya dengan gerakan buruh di tingkat ASEAN. Dalam hal ini, hubungan antara mobilitas kapital dalam rantai nilai di tingkat global dengan gerakan buruh di Asia, khususnya di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur, secara umum, dipengaruhi oleh dua hal. *Pertama*, mobilitas kapital secara global (yang ditandai dengan berbagai kebijakan anti buruh). *Kedua*, latar belakang historis negara-negara di Asia yang kebanyakan merupakan negara pascakolonial juga menjadi konteks penting yang turut memengaruhi perkembangan gerakan buruh di masing-masing negara di Asia.⁶³

Di era kebijakan yang secara keseluruhan anti terhadap gerakan buruh, banyak serikat buruh memiliki *bargaining power* yang lemah

di hadapan kapital, tidak terkecuali serikat buruh di Indonesia. Di beberapa negara, para pekerja bahkan tidak punya hak untuk berorganisasi dan berserikat karena politik didominasi oleh rezim otoritarian di satu sisi dan hubungan industrial di masing-masing negara didominasi oleh satu serikat buruh resmi (yang dibentuk negara) di sisi lain.⁶⁴ Secara khusus, dalam konteks Indonesia, seiring dengan berlakunya pasar tenaga kerja fleksibel, jumlah buruh kontrak pun meningkat dengan tajam. Praktik *union busting* atau pemberangusan serikat di Indonesia juga kian menguat dan bahkan kian agresif. Kuatnya pertumbuhan kapital pun tidak berbanding lurus dengan daya tawar kolektif buruh. Pengorganisasian dan daya tawar kolektif cenderung lebih mudah dilakukan ketika industri berada di tingkat lokal/daerah.

Dalam dunia perburuhan, globalisasi nyatanya telah menjadi sekat bagi bersatunya gerakan buruh. Dalam proses globalisasi, buruh diatomisasi dan terpisah-pisah sebagaimana bentuk pembagian kerja yang baru yang dipengaruhi oleh menguatnya neoliberalisme di hampir seluruh negara di dunia. Dalam situasi baru itu, gerakan buruh harus memiliki dimensi internasional; mereka mempengaruhi sekaligus dipengaruhi rantai nilai yang saling berhubungan dalam industri yang menyebar atau di seluruh dunia. Terkait dengan itu, gerakan buruh tidak mungkin dapat memahami akar penyebab masalah utama yang dihadapi tanpa memahami dinamika di dalam rantai nilai industri di tingkat global. Terlebih, pemberlakuan pasar tenaga kerja yang murah di Asia Tenggara semenjak tahun 1980an⁶⁵, telah mempengaruhi kondisi kerja buruh secara keseluruhan. Dengan kata lain, strategi yang efektif dalam pengorganisasian juga harus memperhatikan situasi global saat ini. Penjelasan mengenai proses pengambilan *surplus value* (nilai lebih) dari buruh dalam proses produksi demi peningkatan akumulasi kapital yang mencakup jam kerja panjang, pengurangan waktu istirahat, pengejaran target

⁶⁰ Lihat John Ingleston (2015). *Buruh, Serikat, dan Politik: Indonesia pada 1920-1930an (Trans.)*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.

⁶¹ Lihat Michael Burawoy (1985). *The Politics of Production*. Thetford, Norfolk: The Thetford Press Ltd.

⁶² Lihat Surendra Pratap (2014). *Op.Cit.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 1.

⁶⁵ Chang Chien-min & Chen Kar-nin Peter (1984). Factors Affecting Industrial Relations in the Electronics Industry of Hong Kong -An Empirical Research Analysis. *Managerial and Decision Economics*, 5(2), 104-115. Diperoleh dari <http://www.jstor.org/stable/2487115>.

produksi lebih banyak, serta hubungan kerja yang tidak jelas, harus dipahami gerakan buruh secara lebih mendalam.⁶⁶

Dalam konteks Indonesia, masuknya Indonesia di dalam skema MEA telah meningkatkan risiko peningkatan intensitas praktik pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel. Intensifikasi kerja sebagai konsekuensi dari rantai nilai yang semakin tersebar dalam bentuk pembagian kerja yang semakin spesifik⁶⁷ pun perlu diantisipasi dan dibaca dalam kaca mata perjuangan kepentingan kaum buruh. Terkait hal ini, intensifikasi kerja merupakan bagian tak terpisahkan dari industri elektronik yang kompleks yang melibatkan banyak operasi yang dibedakan berdasarkan kompleksitas dan intensitas kerja.⁶⁸

Dengan demikian, tak dapat dielakkan pula tingkat kerentanan dalam hubungan dan kondisi kerja akan semakin meningkat. Pada kondisi ini, kekuatan serikat buruh, tidak terkecuali serikat buruh di Indonesia, ditentukan oleh tingkat pemahaman tentang *governance* dari rantai nilai industri yang berlaku dalam industri mereka sehingga dapat mengantisipasi berbagai kerentanan yang mungkin timbul sebagai konsekuensi atasnya sekaligus sebagai konsekuensi dari pemberlakuan rezim pasar tenaga kerja fleksibel secara global.

Dalam hal ini, pemberlakuan MEA membuka peluang bagi gerakan buruh di Indonesia untuk kembali membangun jejaring dan solidaritasnya di tingkat regional (ASEAN), sebelum kemudian memperluas cakupan ke tingkat Asia dan bahkan di level global. Peluang ini dimungkinkan karena pembagian rantai nilai selalu terjadi di dalam ruang (*space*) yang terbatas. Jika ruang

tersebut dimanfaatkan dan solidaritas buruh dapat terbangun hingga di tingkat ASEAN dan bahkan global, gempuran kebijakan ekonomi dengan semua turunannya yang ramah terhadap investasi namun abai terhadap kaum buruh seperti MEA pun akan selalu dapat dihadapi gerakan buruh, termasuk di Indonesia.

Penutup

Dengan menjangkarkan analisis pada rantai nilai industri elektronik, adanya konstruksi kata “massal” di dalam isu PHK pada awal tahun 2016 dapat dilihat dalam dua aspek. Aspek yang pertama adalah kerangka strategi akumulasi kapital dalam rantai nilai industri elektronik, termasuk *merger* perusahaan dan relokasi tempat produksi. Aspek yang kedua adalah pada kerangka semakin tingginya tingkat kerentanan buruh dalam sistem pasar tenaga kerja fleksibel yang juga merupakan bagian dari skema akumulasi kapital yang dilancarkan secara bersamaan dengan kian terintegrasinya rantai nilai industri, termasuk industri elektronik. Pada kedua aspek inilah, muncul tantangan bagi gerakan buruh di Indonesia.

Gerakan buruh di Indonesia, termasuk di sektor industri elektronik, seyogyanya memahami karakter alamiah dari rantai nilai global yang memiliki pola pengaturan atau *governance* yang sangat dinamis. Adanya pemahaman ini akan memberikan implikasi penting khususnya terkait dengan bagaimana gerakan buruh terus membaca posisinya di dalam rantai nilai sehingga kemudian dapat membangun kekuatannya di hadapan pemilik modal secara global.

Selanjutnya, munculnya skema ekonomi yang baru namun dengan konten yang relatif sama dalam hal penyediaan iklim yang kondusif bagi investasi, seperti MEA ini, juga memberikan setidaknya dua pengaruh bagi kondisi kerja buruh yang kian rentan dan bagi gerakan buruh di Indonesia itu sendiri. *Pertama*, dengan berlakunya sistem pasar tenaga kerja fleksibel di dalam rantai nilai industri yang juga semakin mensyaratkan adanya intensifikasi kerja, maka posisi gerakan buruh semakin sentral dalam mengkonsolidasikan kekuatan buruh di tingkat regional (ASEAN). Hal ini dapat dilakukan dengan kembali membangun jejaring dan

⁶⁶ Konsep *surplus value* (nilai lebih) merupakan konsep kunci dalam kritik ekonomi-politik yang diajukan Karl Marx. Nilai lebih secara sederhana adalah sumber utama keuntungan kapitalis yang didapat dari selisih antara hasil kerja dengan upah yang diberikan kepada buruh. Nilai lebih diambil oleh kapitalis dari buruh untuk keuntungan mereka.

⁶⁷ PHK dapat lebih mudah dilakukan jika intensifikasi kerja terjadi karena spesifiknya pekerjaan membuat skill yang dibutuhkan semakin rendah.

⁶⁸ Ian Chalmers (1991). *International and Regional Integration: The Political Economy of the Electronics Industry in ASEAN*. *ASEAN Economic Bulletin*, 8(2), 194–209. Diperoleh dari <http://www.jstor.org/stable/25770367>

solidaritas gerakan buruh di tingkat regional (ASEAN), sebelum ke tingkat Asia dan bahkan ke tingkat global.

Kedua, kesadaran bahwa akumulasi kapital selalu terjadi di dalam ruang yang terbatas juga menimbulkan implikasi munculnya peluang bagi terbukanya ruang solidaritas buruh hingga di tingkat ASEAN dan bahkan di tingkat global. Dengan demikian, gerakan buruh, khususnya di Indonesia, akan selalu dapat memiliki kekuatan di hadapan pemilik modal di dalam berbagai bentuk skema ekonomi seperti MEA, yang melegitimasi *free flow of capital and investment*, namun abai terhadap kepentingan kehidupan kaum buruh.

Referensi

Sumber Non-elektronik

Buku:

- Bieler, Andreas, Lindberg, Ingemar, & Pillay, Devan (Eds.). (2008). *Labour and the Challenges of Globalization: What Prospects for Transnational Solidarity*. London: Pluto Press.
- Burawoy, Michael (1985). *The Politics of Production*. Thetford, Norfolk: The Thetford Press Ltd.
- Harvey, David (2012). *NoRebel Cities: From the Right to the City to Urban Revolution Title*. London: Verso Books.
- Ingleson, John (2015). *Buruh, Serikat, dan Politik: Indonesia pada 1920-1930an (Trans.)*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Izzati, Fathimah Fildzah (2014). *Politik Serikat Buruh dan Kaum Precariat: Pengalaman Tangerang dan Karawang*. Jakarta: Departemen Ilmu Politik FISIP UI dan Puskapol FISIP UI.
- Kearney, Kathleen, Pandita, Sanjiv, & Panimbang, Fahmi (Eds.). (2013). *Labor Rights in High Tech Electronics: Case Studies of Workers' Struggles in Samsung Electronics and Its Asian Suppliers*. Hong Kong: Asia Monitor Resource Centre.
- McKay, Steven C. (2006). *Satanic Mills or Silicon Islands? The Politics of High-Tech Production in the Philippines*. Ithaca: Cornell University Press.
- Pratap, Surendra (2014). *Emerging Trends in Factory Asia: International Capital Mobility, Global Value Chain, and the Labour Movement*. Hong Kong: Asia Monitor Resource Centre.
- Standing, Guy (1999). *Global Labour Flexibility : Seeking Distributive Justice*. New York: ST Martin's Press Inc.
- _____. (2011). *The Precariat: The New Dangerous Class*. London: Bloomsbury Academic.

Bagian dari buku:

- Robison, Richard. 2006. "The reordering of Pax Americana How does Southeast Asia fit in?" In *Empire and Neoliberalism in Asia*, 52-68. Edited by Vedi R. Hadiz. Oxon: Routledge.

Sumber Elektronik

Jurnal:

- Chalmers, Ian (1991). International and Regional Integration: The Political Economy of the Electronics Industry in ASEAN. *ASEAN Economic Bulletin*, 8(2), 194–209. Diperoleh dari <http://www.jstor.org/stable/25770367>
- Chien-min, Chang, & Peter, Chen Kar-nin (1984). Factors Affecting Industrial Relations in the Electronics Industry of Hong Kong -An Empirical Research Analysis. *Managerial and Decision Economics*, 5(2), 104–115. Diperoleh dari <http://www.jstor.org/stable/2487115>.
- Gereffi, Gary, Humphrey, John, & Sturgeon, Timothy. (2005). The Governance of Global Value Chains. *Review of International Political Economy*, 12(1), 78–104. Diperoleh dari <http://doi.org/10.1080/09692290500049805>.
- Koh, D., Chan, G., & Yap, E. (2004). World at Work: The Electronics Industry. *Occupational and Environmental Medicine*, 61(2), 180–183. Diperoleh dari <http://www.jstor.org/stable/27732187>.
- Mufakhir, Abu (2016). "PHK Massal dan Akumulasi Kapital." Diperoleh dari <http://majalahsedane.org/phk-massal-dan-akumulasi-kapital/>.

Artikel di media online

- "5 Alasan Tolak PP Pengupahan"; diperoleh dari <http://www.bantuanhukum.or.id/web/5-alasan-tolak-pp-pengupahan-penjelasan-lengkap/>; internet; diakses tanggal 5 Maret 2016.
- "BPS: Kekhawatiran PHK Massal Berlebihan"; diperoleh dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2425997/bps-kekhawatiran-phk-massal-berlebihan/>; internet; diakses tanggal 27 Februari 2016.

- “Cegah PHK Massal, Rumusan UMP akan Direvisi”; diperoleh dari <http://www.kemenperin.go.id/artikel/7182/Cegah-PHK-Massal,-Rumusan-UMP-akan-Direvisi>; internet; diakses tanggal 3 Maret 2016.
- “Delapan Paket Kebijakan Ekonomi”; diperoleh dari <http://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/delapan-paket-kebijakan-ekonomi/>; internet; diakses tanggal 3 Maret 2016.
- “Gobel: Panasonic tidak tutup pabrik, tapi merger bisnis lampu”; diperoleh dari <http://www.antaraneews.com/berita/543476/gobel-panasonic-tidak-tutup-pabrik-tapi-me-merger-bisnis-lampu>; internet; diakses tanggal 27 Maret 2016.
- “Ini Tujuh Alasan Buruh Tolak PP Pengupahan”; diperoleh dari <http://news.okezone.com/read/2015/11/20/338/1252831/ini-tujuh-alasan-buruh-tolak-pp-pengupahan>; internet; diakses tanggal 5 Maret 2016.
- “Istana Bantah Ada PHK Massal di RI”; <http://bisnis.liputan6.com/read/2428593/istana-bantah-ada-phk-massal-di-ri>; internet; diakses tanggal 3 Maret 2016.
- “Long March Bandung- Jakarta,Ratusan Buruh Sebarkan Satu Juta Petisi Tolak PP 78/2015”; diperoleh dari <http://www.kspi.or.id/long-march-bandung-jakartaratusan-buruh-sebarkan-satu-juta-petisi-tolak-pp-782015.html>; internet; diakses tanggal 22 November 2015.
- Newsletter FORWARD volume 2 tahun 2015; diperoleh dari <http://www.politik.lipi.go.id/download/category/1-newsletter-forward>; internet; diakses tanggal 15 Maret 2016.
- “Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Diminta Tingkatkan Daya Saing”; diperoleh dari <http://economy.okezone.com/read/2015/10/16/320/1232860/paket-kebijakan-ekonomi-jokowi-diminta-tingkatkan-daya-saing>; internet; diakses tanggal 22 November 2015.
- “Panasonic dan Toshiba Henggang, Jokowi Harus Antisipasi PHK Massal.”; diperoleh dari <http://ekonomi.rimanews.com/investasi/read/20160204/259827/Panasonic-dan-Toshiba-Henggang-Jokowi-Harus-Antisipasi-PHK-Massal>; internet; diakses tanggal 15 Maret 2016.
- “Persiapkan MEA, Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Bagus”; diperoleh dari <http://redaksikota.com/2015/10/18/persiapkan-mea-paket-kebijakan-ekonomi-jokowi-bagus/#.VtaMK3194c1>; internet; diakses tanggal 17 Desember 2015.
- “PP Pengupahan Terus Mendapat Penolakan Pekerja dan Buruh”; diperoleh dari <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/10/27/347680/pp-pengupahan-terus-mendapat-penolakan-pekerja-dan-buruh>; internet; diakses tanggal 5 Maret 2016.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja RI. (2015). *Data Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia menurut Provinsi tahun 2015*; diperoleh dari <http://pusdatin.naker.go.id>; internet; diakses tanggal 5 Maret 2016.
- Southeast Asian Nations, A. (2008). *Asean Economic Community Blueprint*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

TENTANG PENULIS

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar

Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana di Department of Politics, University of Sheffield dengan Program Studi MSc in Politics with Research Method. Pernah bekerja di beberapa lembaga penelitian, serta melakukan beberapa aktivitas *freelance*. Selain menempuh studi pascasarjana, juga menulis kolom untuk beberapa media. Minat Kajiannya terletak pada keterkaitan antara Gerakan Sosial dan Politik Internasional, dengan isu spesifik pada Islam Politik, Masyarakat Sipil, Regionalisme, dan Politik Identitas. Aktif sebagai Ketua Divisi Kajian Lingkaran Studi Cendekia dan Wakil Ketua PCI Muhammadiyah Inggris Raya 2015-2017. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: armumar1@sheffield.ac.uk

Arwin Datumaya Wahyudi Sumari

Penulis saat ini aktif sebagai analis Kebijakan Rencana Kontijensi Ekonomi dalam Kedeputian Politik dan Strategi, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Gelar Doktorat diperoleh dari Institute Teknologi Bandung, jurusan Teknik Elektro dan Informasi. Penulis juga pernah bergabung sebagai peneliti di Intelligent System Research Group (ISRG) dan Signal and System Laboratory (SSL) ITB. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: arwin.sumari@dkn.go.id atau arwin.sumari@yahoo.com

Awani Irewati

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Internasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI. S1 ilmu Hubungan Internasional diselesaikan di FISIP Universitas Airlangga, Surabaya. Gelar S2 diperoleh dari Asia and International Studies di Griffith University, Brisbane, Australia. Ia menekuni kajian utama tentang perbatasan antarnegara, khususnya perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga melakukan kajian kajian perbatasan antara Thailand dengan negara-negara tetangganya,

serta mengkaji pendekatan konsep *connectivity* maupun *interconnectivity* di wilayah ASEAN dan sekitarnya. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: irewatiawani@yahoo.co.id.

David Putra Setyawan

Penulis adalah pemerhati masalah diplomasi pertahanan nasional dan aktif sebagai Deputi Informasi dan Komunikasi dalam Lingkaran Studi Strategis. Gelar Magister diperoleh dari Universitas Pertahanan Indonesia, Program Studi Diplomasi Pertahanan. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: fa.davidsetyawan@gmail.com

Diandra Mengko Megaputri

Penulis adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Pendidikan S1 Hubungan Internasional diselesaikan di Universitas Katolik Parahyangan, sementara pendidikan S2 pada bidang ilmu Manajemen Pertahanan diselesaikan di Universitas Pertahanan Indonesia. Pernah aktif sebagai peneliti pada Indonesia Center for Diplomacy, Democracy, and Defense pada tahun 2012-2013. Minat kajiannya adalah isu-isu yang berhubungan dengan pertahanan, keamanan, Security Sector Reform (SSR), dan Industri Pertahanan. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: diandramengko@yahoo.com

Fathimah Fildzah Izzati

Penulis adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI, anggota redaksi *Indoprogress*, dan penulis buku *Politik Serikat Buruh dan Kaum Precariat: Pengalaman Tangerang dan Karawang*. Pendidikan S1 di bidang Ilmu Politik di tempuh di Universitas Indonesia. Penulis menekuni studi-studi yang berkaitan dengan isu ekonomi politik, buruh, perempuan dan politik. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: fildzah.izzati@gmail.com

Ikrar Nusa Bhakti

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI). Gelar sarjana ilmu politik diperolehnya dari FISIP-UI dan gelar Ph.D di bidang Sejarah dan Politik dari School of Modern Asian Studies, Griffith University Brisbane, Australia. Beberapa kontribusi tulisannya antara lain termuat dalam buku Tentara yang Gelisah, Tentara Mendamba Mitra, Bila ABRI Berbisnis, Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru (Penerbit Mizan, Bandung), The Fall of Soeharto, Human Security in Asia, Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki (Pustaka Pelajar, Yogyakarta), serta di jurnal-jurnal ilmiah maupun surat kabar lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: ikrar.lipi@gmail.com

Khanisa Krisman

Penulis adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Gelar S1 Hubungan Internasional diperoleh dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2010. Sementara pendidikan S2 jurusan Hubungan Internasional ditempuh di College of Asia and The Pacific, Australian National University. Ia menekuni studi-studi terkait perkembangan Information and Communications Technology (ICT), isu-isu cyber dan sosial media dalam Hubungan Internasional, serta isu-isu terkait regionalisme di Asia Tenggara dan ASEAN. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: khanisa_krisman@yahoo.com.

Nanto Sriyanto

Penulis adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Gelar S1 Hubungan Internasional diperoleh dari Universitas Padjajaran. Sementara pendidikan S2 ditempuh di The University of Queensland, Australia, School of Political Science and International Studies. Ia menekuni studi-studi terkait perkembangan keamanan internasional dan kawasan, politik luar negeri Indonesia serta kajian teori hubungan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: nantosriyanto@gmail.com

Sandy Nur Ikfal Raharjo

Penulis adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Latar belakang pendidikannya adalah Ilmu Hubungan Internasional untuk S1 dan Resolusi Konflik untuk S2. Ia menekuni studi-studi pembangunan wilayah perbatasan, sengketa dan konflik perbatasan, serta isu-isu stabilitas keamanan regional. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: sandy.raharjo@gmail.com.

Informasi Hasil Penelitian Terpilih

